

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pemanfaatan kapal *illegal fishing* yang telah dirampas oleh negara untuk mendorong terbangunnya kelembagaan ekonomi nelayan guna meningkatkan ekonomi nelayan dalam menciptakan ketahanan ekonomi daerah. Selama melaksanakan penelitian, peneliti menemukan hasil penelitian dan membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelembagaan ekonomi

Kelembagaan ekonomi yang dimiliki nelayan desa Tanjung Pasir masih bersifat tradisional. Kesadaran akan organisasi nelayan pun dirasa masih kurang karena tingkat pendidikan yang rendah. Untuk membangun kelembagaan ekonomi nelayan kecil, maka harus berangkat dari karakteristik lokal. Penguatan kelembagaan nelayan dalam hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk nelayan kecil, tapi lebih pada struktur kelembagaan ekonomi nelayan secara keseluruhan. Kelembagaan ekonomi disini dimaksudkan struktur manajemen usaha perikanan yang meliputi dari hulu ke hilir.

Kelembagaan ekonomi nelayan kecil harus dibangun berdasarkan kelompok-kelompok nelayan yang mandiri dalam sisi produksi. Untuk itu dibutuhkan dukungan lembaga keuangan formal yang mampu mendukung permodalan nelayan dengan karakter nelayan yang memiliki ketidakpastian tinggi. Bentuk kelembagaan ini bisa difasilitasi melalui Badan Usaha Milik Desa yang membentuk koperasi unit nelayan, ataupun Bank Komersial (baik itu perbankan daerah ataupun pada umumnya). Lembaga keuangan ini diharapkan mampu memberikan jaminan modal kepada nelayan, sehingga keterjebakan nelayan pada patron-nya dapat dikurangi.

Selain itu, kelembagaan ekonomi dari sektor penjualan pun harus mulai dibenahi. Pembuatan rantai dingin pada daerah-daerah produksi perikanan harus dimiliki, sehingga ketika produksi perikanan dapat dikendalikan. Pembuatan *cool storage* tingkat desa bisa menjadi sarana seperti lumbung padi, sehingga stok ikan ketika terjaga. Dan tentunya harga ikan mampu dikendalikan oleh BUMDes atau koperasi yang dikelola oleh nelayan.

Pembangunan kelembagaan ekonomi harus berdaulat dari sisi sumberdaya, berdaulat dari sisi produksi, membangun nilai tambah dari produk perikanan yang tidak hanya saja menjual ikan mentah tapi juga mampu membuat produk yang memiliki nilai tambah, serta pembangunan pola konsumsi masyarakat akan pentingnya sumber protein dari perikanan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kelembagaan ekonomi di tingkat nelayan masih menggunakan sistem pasar tradisional yang subsisten. Sementara itu di tingkat negara, perlindungan atas sumberdaya nasional terjadi. Tapi perlindungan terhadap pasar nasional tidak terjadi, karena industri perikanan nasional dibiarkan bertarung dengan negara-negara yang memiliki sistem yang lebih mapan.

2. Ketahanan ekonomi

Kondisi kehidupan keluarga nelayan di Tanjung Pasir tidak memiliki ketahanan ekonomi baik. Hal tersebut terlihat dari kehidupan keluarga nelayan yang hidup dalam kemiskinan terstruktur. Hal tersebut dikarenakan hubungan antar kelompok yang ada di nelayan memiliki hubungan yang saling mengeksploitasi satu dengan lainnya. Pengadaan modal usaha nelayan bersumber dari pinjaman lembaga keuangan non-formal yang menerapkan bunga tidak terbuka (nelayan tidak tahu berapa bunga yang dibebankan). Selain itu, bentuk usaha lain yang harus dilakukan ketika tidak melaut untuk nelayan Tanjung Pasir tidak ada

pilihan. Pembuatan produk perikanan yang memiliki nilai tambah tidak terjadi di daerah ini. Sehingga ketahanan ekonomi nelayan tidak terjadi dengan ketergantungannya kepada alam ataupun pada permodalan. Sedangkan di tingkat nasional, industri perikanan nasional masih tertinggal jauh dengan negara lain. Sehingga perang dagang yang diharapkan pada era dunia tanpa batas, belum mampu dilakukan oleh industri perikanan nasional.

3. Potensi pemanfaatan kapal *illegal fishing* yang dirampas negara

Pemanfaatan kapal untuk nelayan kecil akan mengalami hambatan teknologi dan kebudayaan. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, pengetahuan teknis perikanan yang sederhana, serta kebudayaan nelayan kecil yang tidak biasa melaut beberapa minggu akan menjadi hambatan. Selain itu, bentuk kelembagaan ekonomi di desa Tanjung Pasir belum cukup kuat untuk menggunakan struktur perkapalan yang berteknologi tinggi.

Akan tetapi potensi pemanfaatan kapal *illegal fishing* untuk mendorong kesejahteraan nelayan kecil dan terbentuknya kelembagaan ekonomi perikanan sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari produksi perikanan di Kabupaten Tangerang yang didominasi jenis ikan pelagis kecil pesisir. Jika intervensi berbentuk kapal tersebut ada, maka pemerintah daerah ataupun desa akan dipaksa untuk membentuk kelembagaan ekonomi di daerahnya. Dengan hasil tangkapan ikan pelagis besar, maka nilai ekonomi yang didapatkan tentu akan tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pemanfaatan kapal untuk nelayan kecil tersebut bisa dihibahkan kepada lembaga desa, semisal BUMDes untuk pengelolaannya. Sehingga penyerapan tenaga kerja dari nelayan kecil akan dapat dilakukan, tentunya harus ada proses alih teknologi dan ketrampilan. Hal tersebut

dapat dilakukan melalui kerjasama dengan institusi pendidikan teknis yang berada di bawah KKP.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti merumuskan rekomendasi atas kebijakan perikanan tangkap, sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Kapal *illegal fishing* yang dirampas negara memiliki potensi yang tinggi untuk dikelola menjadi produksi perikanan tangkap nasional. Pengelolaan dapat dihibahkan kepada Perum Perindo sebagai badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik desa, sehingga kapal-kapal tersebut mampu mendorong produktivitas perikanan tangkap nasional yang bertujuan ekspor.
- 2) Pemanfaatan kapal *illegal fishing* yang dirampas negara memiliki potensi tinggi untuk dikelola di tingkat daerah ataupun kelompok-kelompok nelayan yang sudah memiliki kelembagaan kuat. Pemberian hibah bisa dilakukan dengan MoU (*memorandum of understanding*) antara nasional dan daerah, dengan beberapa syarat untuk menyerap tenaga kerja lokal dan lulusan dari lembaga pendidikan yang berada di bawah langsung dari KKP.
- 3) Diperlukan lembaga ekonomi formal sebagai pendukung modal kerja nelayan kecil, sehingga ketergantungan yang tinggi terhadap lembaga-lembaga keuangan non-formal dapat dikurangi. Selain itu, lembaga-lembaga keuangan tersebut harus memberikan pinjaman yang berdasarkan karakteristik nelayan. Perbankan tidak harus menyamakan pemberian kredit antara petani dengan nelayan.

- 4) Negara harus membentuk industrialisasi perikanan yang berangkat dari lokalitas daerah, dengan rantai dingin yang berjalan secara koordinatif dari daerah hingga nasional.